

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membahas temuan yang sudah di dapat selama penelitian di BPBD Kab.Klaten. Ada banyak yang di dapat temuan oleh peneliti seperti bagaimana situasi permasalahan kab klaten dalam menangani bencana, tugas pemerintah dalam penanganan bencana, penanggung jawab bencana, lalu program dan perencanaannya seperti apa, bagaimana BPBD Kab.Klaten melaksanakan komunikasi dan implementasi, yang lainnya evaluasi program yang sudah dilaksanakan BPBD seperti apa. Untuk itu sesuai dengan rumusan masalah yang penulis susun yaitu bagaimana manajemen komunikasi BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana serta faktor pendukung dan penghambat dari penanganan bencana tersebut.

Sesuai dengan rumusan masalah peneliti ingin mengupas bagaimana manajemen komunikasi yang dilakukan oleh BPBD sendiri dalam penanganan bencana. Maka dari itu sesuai dengan kerangka konsep peneliti menganut (Iestari, 2006 :199) yaitu kerangka konsep manajemen komunikasi bencana. Lalu untuk lebih dalam lagi dari manajemen komunikasi bencana BPBD Kab.Klaten tersebut dari kelebihan dan kekurangan, maka peneliti akan menggunakan konsep analisis SWOT.

#### **A. Analisis Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana**

Dalam memetakan konsep manajemen komunikasi BPBD Kab.Klaten peneliti membaginya dalam 4 kategori. Yang pertama adalah kepemimpinan pengendalian, dalam suatu manajemen membutuhkan suatu pemimpin dalam menentukan perencanaan dan evaluasi koordinasi serta dapat memotivasi anggotanya. Yang kedua adalah perencanaan seperti apa yang dilaksanakan pemimpin BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana bersama anggotanya, disini melingkupi efektivitas, sumber daya dan penanggulangan bencana. Yang ketiga adalah organizing BPBD dan kerjasama mitra dalam penanganan bencana. Yang keempat adalah evaluasi dan koordinasi. Dan berikut analisis peneliti :

## **1. Kepemimpinan BPBD Kab.Klaten dalam Pengendalian Bencana di Kabupaten Klaten**

Sesuai dalam peraturan daerah kabupaten klaten nomer 8 tahun 2011 pada bab 4 pasal 6 mengatakan bahwa kepala BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Kenapa pemilihan kepala pelaksana BPBD itu dijabat oleh sekretaris daerah alesannya adalah karena sekretaris daerah ini memiliki koneksi ke semua elemen masyarakat maupun aparatur daerah dan powernya itu bisa menggerakkan elemen masyarakat tersebut. Ini akan memudahkan BPBD dalam mensinergikan visi dan misi penanganan bencana yang diambil dengan elemen masyarakat.

Dalam pengambilan keputusan untuk menyebarkan informasi bencana terhadap publik ini menjadi tugasnya pimpinan kepala pelaksana. Namun tentu kepala pelaksana ini memiliki data dari pusdalops pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana yang dimana pusdalops ini adalah mengelola informasi data perkembangan atau apapun kebencanaan jadi data yang masuk itu mereka kelola lalu di analisa kemudian di sampaikan ke publik. Secara unit pudalops ini di kepalai oleh kepala bidang Kedaruratan dan Logistik.

Salah satu contoh yang terjadi masyarakat di wilayah dekat merapi atau kawasan KRB kawasan rawan bencana mereka pernah panik ketika gunung merapi meletus. Mereka panik karena berspekulasi tipe merapi meletus ini antara magmatik, freatik atau eksposif. Dengan ditambah saluran informasi yang cepat

Seperti yang di dapat peneliti dari data bahwa BPBD Kab.Klaten sendiri memiliki standar operating prosedur atau disingkatnya (SOP) dalam menangani setiap tipe bencana yang berbeda. Jadi bencana yang berbeda ini memiliki SOP tersendiri-sendiri. Dalam contoh kasus daiatas seputar gunung merapi meletus BPBD Kab.Klaten yang pertama dilakukan adalah

relawan-relawan yang berada di wilayah tersebut mereka akan pegang dulu. Di perbanyak koordinasi kesana sehingga penduduk wilayah disana tidak termakan arus informasi yang salah tentang gunung merapi.

Untuk mempermudah komunikasi koordinasi BPBD dengan wilayah kawasan rawan bencana (KRB) mereka menggunakan media gadget whatsapp selain itu mereka meberikan sebuah radio repiter atau HT kepada relawan utama di wilayah tersebut. Selain BPBD Kab.Klaten penduduk di wilayah tersebut dapat memiliki akses dengan BPPTKG yang bewenang dalam menentukan status bencana. Ketika suatu bencana yang tergolong besar dan dikira kurang mampu diatasi BPBD Kab.Klaten mereka tidak sungkan meminta bantuan BPBD tetangga seperti Boyolali.

## **2. Perencanaan Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Pada Masa Normal dan Masa Tanggap Darurat**

### **a. Masa Normal**

Dalam perencanaan komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kab.Klaten terdapat program-program bagaimana mereka melakukan penanggulangan bencana terhadap masyarakat. Adapun pengertian perencanaan menurut Lestari (2011: 96-98) adalah menyusun segala hal-hal yang diperlukan untuk dipikirkan secara matang sebelum dilaksanakan penerjunan lapangan, hal ini guna untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Adapun perencanaan yang dibuat BPBD Kab.Klaten mereka membuat khusus perencanaan untuk pada masa normal dan masa tanggap darurat.

Pengertian masa normal adalah dimana suatu wilayah yang termasuk rawan bencana tidak terindikasi bencana akan datang ke wilayah tersebut. Indikatornya untuk menentukan wilayah tersebut keadaan normal adalah dibantu badan peneliti yang berwenang menentukan langsung keadaan wilayah tersebut normal atau tidak. Dalam hal ini BPBD Klaten berkoordinasi dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTG) untuk

menginformasikan wilayah mana yang dikategorikan memiliki potensi bencana maupun tidak. Sedangkan tanggap darurat adalah masa dimana bencana telah terjadi dan BPBD Kab.Klaten pun telah menyiapkan bagaimana teknis respon cepat terjun langsung menangani ke wilayah terkena bencana. Untuk hal ini mereka mengkoordinasikan dengan berbagai stakeholder.

Untuk perencanaan manajemen komunikasi itu seperti 5w+1h mesti jelas dari tindakan apa yang harus dijelaskan, apakah sebabnya tindakan tersebut, dimanakah tindakan itu harus dikerjakan, kapankah tindakannya, siapakah yang mengerjakan rencana tersebut, bagaimana caranya melaksanakan tindakan itu, hal tersebut diungkapkan lestari puji (2011:96).

Dalam menentukan situasi pra bencana peneliti mendapati dari Arimastuti (*Jurnal Penanggulangan Bencana*, No. 2, 2008: 15-23) Penelitian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa peneliti menemukan pada tim COMPRESS LIPI, mereka ada kesamaan dengan pendapat cutlip dan center yang menekankan pada situasi pra tsunami dengan menggunakan yang pertama yaitu pencarian fakta, perencanaan, berkomunikasi, dan evaluasi.

Selanjutnya sesuai konsep tersebut yang pertama tindakan apa yang dikerjakan BPBD Kab.klaten dalam masa normal penanganan bencana dan sesuai data yang di dapat peneliti akan uraikan dibawah :

Yang pertama adalah sekolah sungai, arti penting sekolah sungai itu adalah menghasilkan relawan yang dapat memiliki sungai binaan. Disamping itu, kegiatan mereka akan berfokus pada upaya penyadaran masyarakat terkait pentingnya merawat sungai. Ini salah satu program BPBD Kab.Klaten dalam urusan menjaga sungai-sungai mereka dari pencemaran dan ingin mensinergikan dengan masyarakat atau tugas bersama. perlu diketahui sekolah sungai ini dikepalai oleh sekretaris daerah kabupaten klaten.

Yang kedua adalah DESTANA desa tangguh bencana Destana adalah program dimana suatu desa mereka diajarkan

bagaimana evakuasi, bagaimana mereka dilatih cara penanganan menghadapi macam-macam bencana ini seperti apa, serta mereka memiliki alat pendukung penanganan bencana semacam HT alat komunikasi, akses jalan evakuasi, transportasi.

Dalam mensukseskan program destana ini perlu adanya dukungan dari tokoh masyarakat daerah tersebut. Seperti halnya Badri (*Jurnal Komunikasi Pembangunan*, No. 1, Februari 2008: 55-71) menyebut berdasarkan keaktifan dan partisipasinya di masyarakat, ketokohan yang banyak berperan yaitu tokoh sosial. Pemuka pendapat merespons positif opini yang berkembang di masyarakat serta mendukung penanganan bencana yang dilakukan pemerintah dan LSM. Dari situlah bagaimana BPBD Kab.Klaten dengan desa sasaran yang dibidik program destana ini mereka harus berkoordinasi dengan tokoh setempat.

Yang ketiga adalah Desa bersaudara atau pesuduluran ini merupakan program untuk beberapa desa di kabupaten Klaten yang termasuk sebagai kawasan rawan bencana dan akan disaudarakan dengan desa terdekat yang tidak termasuk kawasan rawan bencana. Dari desa yang dijadikan tempat buat posko barak pengungsian dengan desa yang di kategorikan kawasan rawan bencana mereka dapat menerima dengan terbuka seperti arti sebuah saudara. Selain itu bukan hanya tempatnya jadi pengungsian namun bisa mengurangi kekhawatiran masyarakat dan kepanikan dalam proses dimana mereka harus evakuasi. Yang lainnya adalah untuk memudahkan pemerintah dan lainnya dalam pelayanan pengungsi. Dan terakhir adalah memudahkan perangkat desa tetap menjalankan kerjanya.

Dari program ke dua dan ke tiga tersebut yaitu program Destana dan Desa Bersaudara ini diperuntukan untuk kawasan rawan bencana (KRB) di Kab.Klaten. Terdapat 3 wilayah desa yaitu Desa Tegalmulyo, Desa Sidoredjo, Desa Balerante. Desa bersaudara atau pesuduluran ini merupakan program untuk beberapa desa di kabupaten Klaten yang termasuk sebagai kawasan rawan bencana dan akan disaudarakan dengan desa terdekat yang tidak termasuk kawasan rawan bencana. Dari

desa yang dijadikan tempat buat posko barak pengungsian dengan desa yang di kategorikan kawasan rawan bencana mereka dapat menerima dengan terbuka seperti arti sebuah saudara. Selain itu bukan hanya tempatnya jadi pengungsian namun bisa mengurangi ke khawatiran masyarakat dan kepanikan dalam proses dimana mereka harus evakuasi. Yang lainnya adalah untuk memudahkan pemerintah dan lainnya dalam pelayanan pengungsi. Dan terakhir adalah memudahkan perangkat desa tetap menjalankan kerjanya.

Yang keempat lainnya yaitu BPBD mengadakan pelatihan mitigasi yang dilakukan BPBD Kab.Klaten adalah meningkatkan pengetahuan-pengetahuan masyarakat dalam menyelamatkan diri secara mandiri menghadapi bencana alam. Dan sasarannya selain desa pada bab diatas, mereka melakukan pelatihan ke sekolah-sekolah mulai dari paud sampai sma sekolah menengah atas, selain itu ada instansi-instansi lainnya seperti puskesmas, rumah sakit, dunia usaha, seperti yang dikatakan asri.

Ada beberapa materi mitigasi bencana ini untuk diajarkan, karena setiap bencana berbeda itu akan beda juga cara penyelamatannya bagaimana. Seperti gempa bumi misalnya, ketika kita sedang berada di gedung dan gempa bumi datang hal pertama yang kita lakukan adalah tutupi kepala lalu pergi ke sudut ruangan gedung tersebut. Berbeda dengan tsunami datang, kita diharuskan lari ke patokan jalur evakuasi yang sudah disediakan pemerintah sebelumnya.

Peneliti menilai bahwa dari program pelatihan mitigasi ini sesuai dengan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam amanat peraturan daerah. pelatihan mitigasi juga merupakan kegiatan pada pra bencana yang artinya menyiapkan masyarakat yang siap menghadapi bencana apapun. Dan ini sesuai masuk dalam konsep perencanaan yang peneliti ambil.

Yang ke lima adalah BPBD pun memperhatikan masyarakat penyandang disabilitas. Mereka memberi nama program tersebut adalah Unit layanan disabilitas (ULD), ini merupakan peraturan tindak lanjut dari pusat yaitu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomer 14

tahun 2014. Untuk mereka BPBD di wilayah kota maupun kabupaten mereka harus menerapkan program ULD ini. Di kabupaten klaten sendiri penyandang disabilitas ini cukup banyak bisa sampai belasan ribu. BPBD Kab.Klaten sendiri sebelumnya sudah mempunyai relawan disabilitas ini, namun semenjak adanya ULD ini jadi membuat mereka lebih paham lagi ilmu penanganan bencana bagi penyandang disabilitas.

Unit layanan disabilitas ini bisa digambarkan sebagai sebuah kelompok yang dimana diharapkan input dan output ULD dalam penanganan bencana efektif. Seperti halnya Badri (*Jurnal Komunikasi Pembangunan*, No. 1, Februari 2008: 55-71) menyebut keragaan kelompok memiliki rataan skor tinggi, terutama kekompakan kelompok, suasana kelompok dan tujuan kelompok. Kondisi ini menunjukkan keberadaan kelompok masyarakat sangat penting untuk mendukung kegiatan penanganan bencana.

Menurut Asri yang merupakan bagian staff Bid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa ULD ini diikuti relawan penyandang disabilitas yang lalu mereka dilatih bagaimana pertolongan pertama, evakuasi tekniknya, maupun micro teaching. Peneliti menilai bahwa Unit layanan disabilitas di masukan ke kategori perencanaan adalah hampir sama dengan pelatihan mitigasi bencana namun berbeda penerapan yang diajarkannya.

kelima program tersebut merupakan dari beberapa program lainnya dan memang diharapkan BPBD Kab.klaten meminimalisir dampak yang lebih besar dari dampak bencana. Disini peneliti menilai bahwa dari 5 program tersebut adalah program yang sesuai bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dari berbagai aspek.

#### **b. Masa Tanggap Darurat**

Pada masa tanggap darurat BPBD Kab.Klaten memiliki beberapa perencanaan dalam upaya secara maksimal menangani bencana di wilayah Klaten. Adapun program-program maupun membuat sebuah tim yang dimiliki BPBD

dalam bertujuan menangani masa tanggap darurat. Untuk itu peneliti akan bahas dibawah ini beberapa perencanaan yang di lakukan BPBD Kab.Klaten dalam masa tanggap darurat :

Yang pertama adalah Pusdalops, dalam tugasnya pusdalops ini di bagi tiga kegunaannya yaitu pada sebelum bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Pada sebelum bencana pusdalops BPBD Kab.klaten ini memberikan dukungan kegiatan bagi masyarakat, pada saat sebelum bencana apa yang dibutuhkan dalam kegiatan ini berupa pengumpul, penyaji data, pengolah serta informasi kebencanaan secara rutin. Pada saat bencanapun pusdalops ini memberikan dukungan pada Posko barak kedaruratan yang sebelumnya sudah dibuat maupun dadakan dalam artinya pusdalops sebagai penyalur pusat informasi ketika barak posko pengungsian membutuhkan apa. Lalu pelaksanaan kegiatan darurat, jadi pusdalops yang merupakan sebagai komando sekaligus menerima data semua kebencanaan disini. Seperti yang dikatakan pak haris semua data seperti korban jiwa, jumlah luka ringan dan lainnya ini akan dilarikan ke pusdalops.

Peneliti menilai bahwa pusdalops ini di masukan kategori perencanaan tanggap darurat adalah karena bisa sebagai suatu unsur data informasi kebencanaan dalam menentukan kebijakan tanggap darurat bencana.

Yang kedua adalah membuat sebuah tim, dalam mengatasi sesuatu penanganan bencana dibutuhkan adanya suatu tim yang berisikan orang-orang kompeten dalam bidangnya untuk penanganan bencana. Dalam tim ini harus bisa memahami tugas dan SOP yang disepakati sebelumnya dalam teknis kebencanaan. Dalam BPBD Kab.Klaten sendiri mereka memiliki tim yang namanya TRC tim reaksi cepat. TRC ini beranggotakan 31 orang dimana mereka dibagi beberapa shift bergiliran untuk standby ketika ada bencana alam datang. Seperti yang dikatakan bapak haris tim diharapkan bisa secara cepat kerjanya ketika informasi bencana datang.

Dalam teknisnya secara detail, tim TRC ini dalam 24 jam dibagi 3 shift bergantian. Satu shiftnya yaitu 8 jam, dalam masa shiftnya ketika ada bencana maupun tidak tetap mereka

diharuskan dicatat dalam buku laporan dan berlaku juga untuk shift selanjutnya. Itu semua jelaskan oleh Haris kabid.kedaruratan dan logistik.

Seperti yang dijelaskan paragraf diatas, TRC ini melakukan koordinasi dengan relawan-relawan yang dekat dengan lokasi bencana. Mereka ini sudah saling kerjasama antara pemerintah dengan non pemerintah serta BPBD sendiri mempunyai data daftar relawan tersebar se kabupaten klaten. Tentu dalam penanganan pemerintah tidak bisa sendiri dan butuh dukungan relawan inilah dalam membantu penanganan bencana yang cepat. Hal ini diutarakan Haris sebagai kabid kedaruratan dan logistik. Peneliti memasukan kebijakan membuat sebuah tim reaksi cepat ini ke dalam perencanaan karena salah satu unsur penanganan bencana.

### **3. Organizing BPBD Kab.Klaten dan Kerja Sama (Kemitraan) Dalam Penanganan Bencana**

Pengorganisasian adalah suatu struktur pembagian wilayah kerja yang dimana di setiap bidang divisi bakal diisi dengan orang-orang yang kompeten. Seperti Lestari (2011: 96-98) menuturkan bahwa pengorganisasian ini merupakan hal yang paling perlu dimana proses penempatan pembagian kerja yang sesuai dengan setiap orang yang memiliki kemampuan tersebut.

Hubungannya dengan BPBD Kab.Klaten adalah mereka membutuhkan yang namanya pengorganisasian ini, di dalam BPBD karena untuk menangani bencana ada berbagai bidang yang harus dimiliki. Selanjutnya peneliti akan bahas dibawah ini pengorganisasian yang dibangun oleh BPBD Kab.Klaten :

kepala badan yaitu sekretaris daerah Klaten, dibantu Kepala unsur pelaksana, sekretariat yang dibagi tiga sub antara lain :  
1.sub bagian perencanaan dan pelaporan, 2. Sub bagian keuangan,  
3. Sub bagian umum dan kepegawaian. Lalu selanjutnya ada 3 bidang yang krusial dalam penanganan bencana yaitu : 1. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 2. Bid. Kedaruratan dan Logistik, 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Di dalam pengorganisasian BPBD KAB.Klaten terdapat 3 bidang yang peneliti pilih dalam mengambil data karena ke tiga bidang ini lah yang terkait utama dalam penanganan bencana. Mulai dari pra bencana tentu ini bagian dari Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang kedua bagian dimana pas bencana yaitu Bid. Kedaruratan dan Logistik dan yang terakhir bagian pasca bencana yaitu Bid. 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Di ketiga bidang tersebut tentu terdapat staff seksi yang membantu kepala bidangnya. namun dalam kerjanya mereka tidak bekerja sendiri ada dimana mereka saling bekerjasama seperti pada pas bencana.

Lebih jauh lagi peneliti mendapati dari data yang di dapat untuk ke tiga bidang tersebut akan dibahas tugasnya seperti apa. Yang pertama adalah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang ini lebih menitik fokuskan pada masa pra bencana, jadi mereka menyiapkan kebijakan mitigasi, kesiapsiagaan, pencegahan lalu menyiapkan pemberdayaan masyarakat. Lalu bidang tersebut di bagi dua seksi yaitu seksi pencegahan dan seksi kesiapsiagaan. Tentu ke dua seksi tersebut pun tugasnya berbeda pelaksanaannya.

Yang kedua yaitu bidang kedaruratan dan logistik bidang ini bekerja utama pada saat terjadi bencana. Mereka sebagai komando dalam masa tanggap darurat serta mengkoordinasikan dengan berbagai stakeholder dan tidak lupa bahwa mereka juga menyiapkan logistik. Bidang ini juga dibagi dua seksi yaitu seksi kedaruratan dan seksi logistik tentu juga tugasnya mereka berbeda.

Yang ketiga adalah bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, mereka bekerja pada saat sesudah bencana selesai atau pasca bencana. Mereka berkoordinasi dengan berbagai pihak menyiapkan kebijakan penanggulangan bencana. Bidang ini juga di bagi 2 seksi yaitu seksi rehabilitasi dan seksi rekonstruksi. kedua bidang ini memiliki tugas yang berbeda contohnya seksi rehabilitasi mereka menyiapkan seperti pedoman teknis, standart perencanaan, kebijakan, laporan segala macam lainnya. Dan seksi rekonstruksi tentu hampir sama dengan rehabilitasi teknisnya namun lebih kepada rekonstruksi.

Terdapat beberapa pengambilan keputusan penting BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana. Mulai dari program

perencanaan seperti apa yang dipakai, komunikasi dan implementasi untuk penanganan bencana, dan evaluasi program. Dari hal tersebut tentu ada bagian yang memimpin masing-masing rangkaian penanganan bencana mulai dari pra bencana, pas bencana dan pasca bencana.

Di dalam organisasi pastinya ada dimana mengadakan komunikasi agar ada pemahaman yang sama antara internal maupun eksternal. Dan BPBD Kab.klaten pun memperhatikan ini

Untuk mitra BPBD Kab.Klaten seperti relawan-relawan yang tersebar di klaten mereka sering mengadakan pertemuan relawan 3 bulan sekali. Dari pertemuan itu terjadi adanya komunikasi yang dibangun antara BPBD dengan relawan. BPBD menginginkan sepemahaman visi dan misi mereka dengan relawan dalam penanganan bencana. mengkomunikasikan secara aktif menjaga perasaan pemikiran dan pandangan. Adapun ilmu-ilmu yang baru dalam penanganan bencana maupun setiap ada pembaruan teknis baru dalam penanganan bencana mereka bicarakan.

Perencanaan selanjutnya adalah di wilayah koordinasi dengan stakeholder lainnya. Dalam upaya penanganan bencana dibutuhkan koordinasi di wilayah Kab.Klaten, mereka sangat memperhatikan berbagai aspek dalam mensinergikan dengan masyarakat, aparatur negara seperti lembaga-lembaga Sipil, TNI, POLISI dan lainnya. Dan dibawah ini peneliti akan uraikan 10 sektor penanganan yang dilakukan BPBD Kab.Klaten :

1. Yang pertama adalah sektor posko, disini yang bertugas dan wewenangnya di pegang langsung oleh BPBD Kab.Klaten. untuk menyiapkan posko induk darurat, jadi ini sudah dipersiapkan betul bagaimana orang-orang yang dipilih dan kompeten serta teknis manajemennya lalu koordinasinya bagaimana.
2. Selanjutnya yang kedua adalah sektor pendidikan, sektor tersebut di koordinasikan oleh dinas pendidikan kab.klaten. karena pendidikan itu harus tetap berjalan. Dinas pendidikan pun menyiapkan sekolah darurat bagi masyarakat terkena bencana. Untuk itu dalam rangka menyepakati pihak-pihak terkait dengan sektor kesehatan pada saat terjadi penanganan

pengungsian shelter di barak pengungsian maka didirikanlah proses kegiatan pendidikan.

3. Kemudian yang ke tiga sektor kesehatan, yang mana itu merupakan kebutuhan yang penting bahawasannya setiap bencana akan menelan korban maupun tidak bagi setiap pengungsi atau siapapun. Dan ini dikoordinasikan oleh dinas kesehatan kab.klaten yang dibantu oleh anggotanya kebawah seperti puskesmas, rumah sakit dan lainnya. Dalam masa kejadian bencana, pengobatan, pelayanan dan pertolongan bagi masyarakat terdampak tidak akan dipungut biaya alias gratis. kemudiiian sektor kesehatan yang mana itu merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap pengungsi atau siapapun.
4. kemudian yang ke empat yaitu sektor evakuasi, dikoordinasikan oleh BPBD Kab.Klaten. BPBD ini lah yang nantinya mengkoordinasi dengan masyarakat terkait atas segala hal angkutan transportasi bagi masyarakat untuk evakuasi. Belum lagi jalur-jalur jalan evakuasi bagi masyarkat buat evakuasi. Disisi lain masyarakat pada kawasan rawan bencana untuk transportasinya sendiri mereka boleh dikatakan mencukupi, karena mereka mempunyai kendaraan pribadi sendiri.

Evakuasi ini merupakan sektor yang mengkaitkan berbagai pihak dalam rangka untuk mengajak, meminta kepada masyarakat khususnya wilayah yang ada di kawasan rawan bencana 3 lereng merapi yaitu 3 desa, desa tegalmulyo, desa sidoredjo dan desa balerante. Pola evakuasinya dilakukan secara mandiri artinya masyarakat dengan segala kesadarannya yang sudah sangat tinggi kemudian dengan dukungan sarana, prasarana dan transportasinya. Sebagaimana diketahui diatas itu yaitu sudah tersedia armada truk, kendaraan roda 4 bahkan ratusan dan itu sangat sangat memungkinkan malah sudah berlebih artinya penduduk yang harus turun mengevakuasi diri secara mandiri.

5. Dan lainnya yang ke lima yaitu sektor keamanan, hal ini tentu di koordinasikan oleh polres kab.klaten. namun dalam pelaksanaannya dibantu oleh kodim, satpol pp, hansip dan ormas mereka saling membantu sama lain dalam melindungi masyarakat serta membantu masyarakat. Contoh melindungi dan membantu masyarakat adalah mereka mengamankan

proses perjalanan evakuasi yang dilakukan masyarakat, membantu melindungi barang berharga masyarakat dan lainnya. Polres pun mereka harus melakukan koordinasi dengan BPBD, karena BPBD yang berwenang dalam urusan kebencanaan.

6. Yang keenam yaitu sektor barak, sektor ini di koordinasikan oleh dinas pekerja umum. Jadi mereka menyiapkan barak pengungsian yang dimana barak shelter tersebut bersifat permanen. Selain itu juga mereka mempersiapkan atau memastikan jalan jalur menuju barak baik dan tidak ada bolong maupun bergelombang jalan tersebut.

Untuk lokasi shelter barak sendiri yang mana sektor barak yang ada di kabupaten klaten ini ada 3 desa kawasan rawan bencana klaten, yang sebelah timur itu namanya desa tegalmulyo, desa tegal mulyo ini diarahkan untuk nanti ke shelter kebarak pengungsian di desa demak hijau kecamatan ngarangnongko, kemudian desa sidorejo itu posisi desa yg di tengah itu diarahkan nanti ke barak di desa menden kecamatan kebonarum, kemudian berikutnya yang paling barat itu perbatasan dengan kabupaten sleman yaitu desa balerante. ketiga desa itu semuanya di kecamatan kemalang, desa balerante nanti masyarakatnya akan diarahkan ke shelter barak pengungsian di desa kebondalemalor kecamatan prambanan, jadi artinya semua sudah terencana.

7. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sektor dapur umum, sektor tersebut di koordinasikan oleh BPBD Kab.klaten serta dibantu oleh swasta seperti ormas-ormas yang berada di kab.klaten. Dapur umum ini penting karena hak dasar bagi pengungsi dalam urusan perut. sektor barak dapur umum saat proses pengungsian di barak-barak pengungsian itu nanti akan otomatis di jamin, di layani untuk pemenuhan hak-hak dasar makan.

Yang jelas makanan itu oleh sektor dapur umum yang mana dapur umum ini sementara akan di laksanakan oleh 3 lembaga. Yang tadi shelter atau barak pengungsian di desa yang di desa demakijo kecamatan karangnoko nanti akan dilaksanakan oleh pmi cabang klaten, otomatis pmi ini akan menggandeng koleganya di soloraya. Kemudian di shelter barak pengungsian yang desa menden kecamatan kebonarum ini nanti dapur

umumnya dilaksanakan oleh lembaga penanggulangan bencana muhammadiyah kabupaten klaten, otomatis dengan koleganya lembaga penanggulangan bencana muhamdiah se soloraya. kemudian di barak atau pengunsian di desa kebon dalemlor itu nanti dapur umum akan di koordinasikan oleh tagana taruna siaga bencana yang mana itu anak binaan bina sosial nah itu sektor dapur umum.

8. Sektor yang ke delapan yaitu sektor komunikasi, hal ini di koordinasikan oleh dinas komunikasi dan informasi kabupaten klaten. Dalam seputar komunikasi kepada masyarakat klaten ini terkoneksi langsung dengan pusdalops BPBD dan BPPTG. Dalam artian dinas komunikasi dan informasi ini sebagai penyalur lagi informasi pusdalops dan BPPTG ke masyarakat. Dalam penyebarannya mengerahkan media massa maupun media sosial, hal tersebut untuk memastikan tersampaikan informasi kebencanaan ke masyarakat. Namun dalam pelaksanaan di lapangan komando utama di pegang langsung oleh BPBD Kab.Klaten.

9. Sektor ke sembilan yaitu sektor ekonomi, hal tersebut di koordinasikan oleh dinas pertanian. Sektor ekonomi jadi diperhatikan oleh pemerintah sebab salah satu faktor menghambat evakuasi adalah masyarakat yang tidak mau ternak nya tidak dibawa evakuasi juga. Ternak tersebut juga merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat

Hewan ternak yang di miliki masyarakat tersebut adalah sapi dan kambing. Jadi pada saat evakuasi BPBD sudah menyediakan kandang-kandang sementara yang di mana itu dibangun berdekatan dengan shelter atau barak pengunsian

10. Yang terakhir yang ke sepuluh yaitu sektor logistik, hal ini di koordinasikan oleh BPBD sendiri. terutama bidang kesiapsiagaan dan logistik disini mereka menyiapkan perencanaan kebijakan di bidang dukungan logistik seperti pedoman teknisnya, pelaksanaan kebijakannya, bekerjasama dengan bidang logistik, laporan, bahan evaluasi dan lainnya yang berkaitan dengan logistik.

Untuk upaya penggorganisasian berjalan adalah dengan faktor komunikasi yang berperan yaitu sebagai komunikator dan komunikan bagi pelaksana penanganan bencana dan masyarakat

sesuai dengan perannya dalam kegiatan penanganan bencana. Perubahan karakteristik personal dan perilaku komunikasi pemuka pendapat memiliki banyak peubah yang tidak berpengaruh nyata. (Badri, M, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, No. 1, Februari 2008: 55-71).

#### **4. Evaluasi dan Koordinasi BPBD Kab.Klaten dalam Penanganan Bencana**

Dalam melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi BPBD Kab.Klaten membuat laporan yang namanya jitupasna. Jitupasna ini dilaksanakan oleh kabid 3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. laporan tersebut berupa menghitung kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh bencana terjadi. Dari sisi masyarakat yang terdampak melingkupi korban meninggal, korban luka berat dan ringan. Serta tidak hanya itu saja jitupasna ini menghitung area yang terdampak melingkupi infrastruktur umum, sekolah, rumah dan lain-lain. Selain itu menyelidiki bagaimana bencana tersebut bisa terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana proses terjadi bencana tersebut secara ilmiah.

Kabid 3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini tentu tidak sendiri melaksanakan laporan jitupasna tersebut karena dibantu dengan kabid 1 dan kabid 2 serta koordinasi dengan mitra-mitra BPBD Kab.Klaten seperti relawan-relawan, Polisi,TNI, SAR dan lainnya.

Tidak hanya itu saja kabid 3 membuat yang namanya rencana aksi atau disingkat renaksi. Renaksi ini menyusun pemulihan dan pembangunan bertahap 3 sampai 4 tahun kedepan dari pasca bencana yang terjadi. Melingkupi pemulihan healing atau trauma, sosial, ekonomi masyarakat terdampak maupun infrastruktur umum dan rumah masyarakat. hal ini di koordinasikan dengan kepala BPBD lalu disalurkan ke pusat yaitu BNPB.

Untuk pemulihan healing atau trauma masyarakat, BPBD menerima bantuan bekerjasama dengan organisasi NGO dan lainnya yang merupakan spesialisasinya. Jadi peneliti mendapati dari data bahwa setiap bantuan yang masuk dari luar mereka wajib

berkoordinasi dengan BPBD Kab.Klaten untuk dicatat diijinkan atau tidak karena BPBD Kab.Klaten sebagai komando utama penanganan bencana.

## B. Analisis SWOT

Pada pembahasan ini peneliti akan menganalisa kelebihan dan kekurangan manajemen komunikasi BPBD Kab. Klaten dalam penanganan bencana yaitu dengan Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat atau disebut dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu formula strategi yang biasanya digunakan oleh perusahaan maupun organisasi dalam menentukan langkah-langkah seperti apa yang akan di pakai untuk kedepan. Dalam menganalisis ini biasanya mereka melihat berbagai faktor yang sekiranya dapat dijadikan bahan lalu diidentifikasi secara sistematis dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

Seperti halnya menurut Freddy Rangkuti (2001:18-19) mengatakan bahwa, analisis SWOT dalam menentukan strategi perusahaan maupun organisasi mereka akan mengidentifikasi dari berbagai faktor secara sistematis lalu didasarkan pada pemikiran secara logika yang memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (Opportunities), namun di satu sisi akan dampak meminimalkan kelemahan (weakness) serta ancaman (Threats).

Dan dibawah ini peneliti akan menjelaskan analisa tabel dan analisis SWOT kelemahan dan kelebihan dari BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana setelah mendapati data yang di dapat :

Strength (S)	Weakness (W)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemimpin sebagai pilar utama dengan ketua BPBD Kab.Klaten di pimpin oleh sekretaris daerah Kabupaten Klaten dan ini mempermudah koordinasi dengan stakeholder untuk penanganan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memiliki Manajemen komunikasi yang baik dalam sarana informasi publik seperti :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Website resmi BPBD Kab.Klaten tidak menyajikan informasi yang lengkap.</li> <li>Media sosial seperti</li> </ol> </li> </ul>

<p>bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki tim reaksi cepat yang bekerja dalam 24 jam</li> <li>• Memiliki radio repiter dan media whatsapp sebagai media komunikasi dengan relawan atau stakeholder terkait</li> <li>• Program pembinaan masyarakat dalam penanganan bencana</li> <li>• Pusdalops pusat pengendalian operasional dengan di dukung peralatan teknologi canggih ini menyimpan data dan informasi kebencanaan di Wilayah Kabupaten Klaten</li> </ul>	<p>Instagram dan Facebook mereka tidak memiliki akun resmi. Hanya memiliki akun resmi twitter</p>
<p><b>Opportunities (O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan dan memanfaatkan media komunikasi teknologi canggih seperti memperbaiki website resmi BPBD dan media sosial.</li> </ul>	<p><b>Threats (T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat sering kali berspekulasi sendiri status bencana gunung merapi tanpa konfirmasi ke pihak yang berwenang seperti BPPTG dan BPBD</li> <li>• Karena penyaluran informasi sudah canggih dan cepat dapat penyebaran informasi hoax bencana terjadi di masyarakat</li> </ul>

Tabel 4.1 Analisa SWOT Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Dalam penanganan Bencana

Analisa tersebut peneliti dapati dari hasil data yang di dapat dari ketiga narasumber. Lalu dari data tersebut peneliti mengolah dan analisis menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari penanganan bencana di Kabupaten Klaten oleh BPBD Kab.Klaten.